



Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan BUMDes Gerbang Raja Dan BUMDes Usaha Jaya di Kabupaten Bone Bolango (*Comparative Analysis of Financial Management at BUMDes Gerbang Raja and BUMDes Usaha Jaya in Bone Bolango*)

Siti Nurhalija R. Bakar¹, Andi Yusniar Mendo², Nurharyati Panigoro³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

sitibakar39@gmail.com¹, andi.yusniarmendo@ung.ac.id², nurharyati@ung.ac.id³

Article Info	Abstract
Article history: Received: 19 Agustus 2026 Revised: 22 September 2026 Accepted: 28 September 2026	<i>This study aims to describe, evaluate, and compare financial management practices at BUMDes Gerbang Raja in Huntu Barat Village and BUMDes Usaha Jaya in Huntu Selatan Village, Bulango Selatan District, Bone Bolango Regency. The study focuses on planning, implementation, administration, reporting, and financial accountability. A qualitative descriptive-comparative approach was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the directors, secretaries, and treasurers of both BUMDes. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that both BUMDes conduct planning through meetings and village deliberations and use work plans as the basis for operational activities. The main differences concern bookkeeping, recording systems, reporting frequency, and internal control. Gerbang Raja has adopted digital recording using Excel and the FORCA application, prepared more structured financial reports, and reported periodically every three months. Usaha Jaya still relies on a manual general cash book and reports every six months or annually, although it has attempted to align its reports with SAK EMKM. These differences are associated with human-resource capacity, technology utilization, village-government support, and the implementation of transparency and accountability principles. The study concludes that regulations must be accompanied by organizational readiness, managerial competence, adequate administrative systems, and continuous supervision.</i>
Keywords: Financial Management BUMDes Accountability Financial Governance Comparative Study	
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan BUMDes Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Studi Komparatif	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan membandingkan pengelolaan keuangan BUMDes Gerbang Raja di Desa Huntu Barat dan BUMDes Usaha Jaya di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Fokus kajian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas direktur, sekretaris, dan bendahara dari masing-masing BUMDes. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua BUMDes telah melaksanakan perencanaan melalui rapat dan musyawarah desa, serta menggunakan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Perbedaan utama terlihat pada penatausahaan, sistem pencatatan, frekuensi pelaporan, dan mekanisme pengendalian. BUMDes Gerbang Raja telah menggunakan pencatatan berbasis digital, antara lain Excel dan aplikasi FORCA, menyusun laporan secara lebih terstruktur, serta melakukan

pelaporan secara berkala setiap tiga bulan. Sebaliknya, BUMDes Usaha Jaya masih menggunakan buku kas umum secara manual, dengan pelaporan yang dilakukan setiap enam bulan atau satu tahun sekali, meskipun telah berupaya menyesuaikan laporan dengan SAK EMKM. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dukungan pemerintah desa, dan tingkat penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perlu diikuti oleh kesiapan organisasi, kompetensi pengurus, sistem administrasi yang memadai, dan pengawasan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Siti Nurhalija R. Bakar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo
sitibakar39@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional karena memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi secara produktif dan berkelanjutan (Nurhayati et al., 2025). Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola potensi lokal melalui kegiatan usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Sutrisna, 2020). Dalam konteks tersebut, keberadaan BUMDes diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal (Alkadafi, 2014).

BUMDes pada dasarnya memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial (Siregar et al., 2023). Dari sisi ekonomi, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan mengembangkan potensi lokal. Dari sisi sosial, BUMDes diharapkan mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat desa. Tata kelola yang baik diperlukan agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan secara seimbang. Pengelolaan BUMDes perlu memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Syafikri et al. (2021) menjelaskan bahwa tata kelola BUMDes dengan perspektif good governance berkaitan dengan bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsi organisasi secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam tata kelola BUMDes. Keuangan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan yang tertib diperlukan agar penggunaan dana dapat diketahui, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan. Raharjo (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memerlukan proses yang terstruktur agar sumber daya keuangan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar normatif yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, tahapan tersebut digunakan sebagai kerangka untuk melihat praktik pengelolaan keuangan pada BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya.

Pentingnya pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada pemerintah desa, pengawas, dan masyarakat. Informasi keuangan yang tertib dapat membantu pihak yang berkepentingan memahami kondisi usaha, penggunaan dana, hasil kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi. Iswoyo et al. (2023) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Dalam praktiknya, kemampuan BUMDes dalam menyusun laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia. Pengurus yang memahami administrasi dan akuntansi akan lebih mudah melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan, dan menjelaskan kondisi keuangan organisasi. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara

sederhana. Menne dan Hasiara (2023) menekankan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen manajemen merupakan faktor yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan.

Selain sumber daya manusia, sistem administrasi dan teknologi juga dapat memengaruhi pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem pencatatan berbasis teknologi dapat membantu mempercepat proses pencatatan, mengurangi pekerjaan berulang, dan memudahkan penyusunan laporan. Namun, teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa kemampuan pengguna. Sistem yang baik tetap membutuhkan pengurus yang memahami prosedur dan mampu mengoperasikannya secara konsisten.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) juga relevan dalam pembahasan laporan keuangan BUMDes. SAK EMKM dirancang dengan konsep yang lebih sederhana sehingga dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi karakteristik tertentu. Anggraeni et al. (2021) menjelaskan bahwa SAK EMKM memberikan bentuk penyajian yang lebih sederhana bagi entitas yang sesuai dengan karakteristiknya. Nuvitasari dan Murtiana (2019) juga menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap SAK EMKM sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya menjadi objek yang menarik karena kedua BUMDes berada dalam wilayah Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, tetapi memiliki kondisi pengelolaan keuangan yang berbeda. BUMDes Gerbang Raja berada di Desa Huntu Barat dan mengelola beberapa unit usaha, antara lain pangkalan gas elpiji, jasa laundry, budidaya ikan, dan peternakan. Sementara itu, BUMDes Usaha Jaya berada di Desa Huntu Selatan dengan kegiatan usaha seperti simpan pinjam, kios, budidaya ikan, dan peternakan ayam petelur.

Kedua BUMDes tersebut memiliki lingkungan geografis dan administratif yang relatif berdekatan. Kesamaan konteks wilayah memungkinkan perbandingan pengelolaan keuangan dilakukan dengan melihat perbedaan internal masing-masing organisasi. Penelitian komparatif semacam ini penting karena keberadaan regulasi yang sama tidak selalu menghasilkan praktik pengelolaan yang sama. Sitepu (2018) menunjukkan bahwa dua BUMDes dapat mengalami perbedaan dalam proses dan hasil pengelolaan meskipun berada dalam kerangka kelembagaan dan ketentuan pembentukan yang serupa.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa BUMDes di Indonesia masih menghadapi tantangan tata kelola. Fadilah et al. (2026) menemukan bahwa persoalan tata kelola BUMDes antara lain berkaitan dengan kapasitas pengelola, kelembagaan, administrasi, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Mukromin et al. (2021) menekankan pentingnya tata kelola organisasi berbasis potensi lokal dalam mendukung keberlangsungan BUMDes. Sementara itu, Karim (2019) menempatkan BUMDes sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi dan sumber daya lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya dilaksanakan, bagaimana perbedaan pengelolaan keuangan pada kedua BUMDes, serta faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan membandingkan pengelolaan keuangan kedua BUMDes berdasarkan lima aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap proses pengelolaan keuangan secara komprehensif, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sekaligus membandingkan penerapannya pada dua objek penelitian. Metode deskriptif komparatif digunakan karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan pada masing-masing BUMDes, tetapi juga menganalisis persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pada kedua lembaga tersebut.

Penelitian dilaksanakan pada BUMDes Gerbang Raja yang berlokasi di Desa Huntu Barat dan BUMDes Usaha Jaya yang berada di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kedua lokasi dipilih secara purposive karena berada dalam lingkungan kebijakan yang sama, namun menunjukkan karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda sehingga relevan untuk dilakukan analisis komparatif. Penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan skripsi pada tahun 2026, dimulai sejak tahap pengumpulan data lapangan hingga proses analisis dan penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian adalah dua Badan Usaha Milik Desa, yaitu BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Informan terdiri atas direktur, sekretaris, dan

bendahara pada masing-masing BUMDes. Direktur dipilih karena bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional BUMDes, sekretaris bertanggung jawab pada aspek administrasi dan dokumentasi kelembagaan, sedangkan bendahara memiliki kewenangan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan kas. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang kredibel sesuai fokus penelitian.

Fokus penelitian digunakan sebagai batasan agar proses pengumpulan dan analisis data tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan pada BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya yang dianalisis berdasarkan lima tahapan utama, yaitu: Perencanaan, meliputi proses penyusunan program kerja, rencana kegiatan, anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta keterlibatan pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam proses perencanaan. Pelaksanaan, meliputi penggunaan dana untuk kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan unit usaha berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Penatausahaan atau pencatatan, meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan kas, penyimpanan bukti transaksi, serta sistem administrasi keuangan yang digunakan, baik secara manual maupun berbasis teknologi. Pelaporan, meliputi proses penyusunan laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan semester, maupun laporan tahunan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban, meliputi penyampaian hasil pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat serta bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh BUMDes. Kelima aspek tersebut kemudian dibandingkan antara BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan pada masing-masing BUMDes.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan pada kedua BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan keuangan, buku kas umum, laporan pertanggungjawaban, struktur organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan keuangan yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti memiliki keleluasaan menggali informasi secara lebih mendalam sesuai perkembangan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan BUMDes.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan tingkat kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari direktur, sekretaris, dan bendahara pada masing-masing BUMDes, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada informan guna memastikan bahwa hasil interpretasi data telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penerapan teknik-teknik tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa temuan penelitian memiliki tingkat validitas, reliabilitas, dan kredibilitas yang tinggi sehingga layak dijadikan dasar dalam menjelaskan perbedaan pengelolaan keuangan antara BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

BUMDes Gerbang Raja merupakan BUMDes yang beroperasi di Desa Huntu Barat. Unit usaha yang dikelola meliputi pangkalan gas elpiji, jasa laundry, budidaya ikan air tawar, dan ternak ayam. Dalam pengelolaan keuangannya, BUMDes ini telah menggunakan pencatatan berbasis Excel dan aplikasi FORCA. Penggunaan sistem tersebut membantu pengurus melakukan pencatatan transaksi, mengelola data, dan menyusun laporan secara lebih teratur.

BUMDes Usaha Jaya berlokasi di Desa Huntu Selatan dan mengelola unit usaha simpan pinjam, meubel, budidaya ikan air tawar, dan ternak ayam. Pengelolaan keuangan telah dilakukan melalui pembagian peran antara pengurus inti dan pengelola unit usaha. Namun, pencatatan transaksi masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku kas umum. Kondisi ini membuat proses pengolahan data dan penyusunan laporan memerlukan waktu lebih panjang.

3.2 Perbandingan Pengelolaan Keuangan

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Keuangan BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya

Aspek	BUMDes Gerbang Raja	BUMDes Usaha Jaya	Persamaan/Perbedaan
Perencanaan	Rencana kerja disusun setiap tahun	Rencana disusun sesuai kebutuhan	Keduanya menggunakan rapat dan musyawarah desa

	berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya; melibatkan direktur, sekretaris, bendahara, dan pengelola unit usaha.	usaha, termasuk secara bulanan; melibatkan pengurus inti.	serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan	Penggunaan dana mengacu pada program kerja dan RAB; terdapat persetujuan dan pengawasan rutin; terdapat kerja sama pihak ketiga dengan sistem bagi hasil.	Penggunaan dana disesuaikan kebutuhan operasional; pencairan diajukan unit usaha kepada bendahara dan disetujui direktur; pengawasan dilakukan melalui kontrol lapangan.	Keduanya memiliki prosedur pencairan dan pengawasan, tetapi tingkat pengendalian Gerbang Raja lebih terstruktur.
Penatausahaan	Pencatatan dilakukan setiap transaksi dengan nota/kwitansi; menggunakan Excel dan FORCA; mengacu pada SAK EMKM.	Pencatatan dilakukan berkala dalam buku kas umum; menggunakan bukti transaksi; sistem masih manual dan sederhana.	Keduanya menyimpan bukti transaksi, tetapi berbeda dalam teknologi dan keteraturan pencatatan.
Pelaporan	Laporan disusun setiap bulan, disampaikan kepada pemerintah desa, pengawas, dan masyarakat; pelaporan rutin setiap tiga bulan.	Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan kepada pemerintah desa serta pengawas; pelaporan dilakukan setiap enam bulan atau setahun sekali.	Keduanya melakukan pelaporan, tetapi Gerbang Raja lebih sering dan lebih luas menyampaikan laporan.
Pertanggungjawaban	Disampaikan melalui musyawarah desa; evaluasi melalui rapat dan pemeriksaan laporan keuangan.	Disampaikan melalui musyawarah desa; evaluasi berdasarkan laporan kegiatan usaha.	Keduanya mempertanggungjawabkan kegiatan melalui musyawarah desa, dengan kedalaman evaluasi yang berbeda.

3.3 Perencanaan

Pada aspek perencanaan, kedua BUMDes telah menunjukkan adanya proses penyusunan rencana kerja dan pembahasan melalui forum rapat atau musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak sepenuhnya dilakukan secara individual, melainkan melibatkan pengurus dan unsur pemerintah desa serta masyarakat. Kegiatan usaha juga disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Perbedaannya terletak pada dasar dan cakupan perencanaan. Gerbang Raja menyusun rencana kerja tahunan dengan mempertimbangkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Pola ini memperlihatkan upaya menghubungkan pengalaman masa lalu dengan rencana berikutnya. Usaha Jaya lebih banyak menyusun rencana berdasarkan kebutuhan operasional usaha yang berjalan. Meskipun praktis, pola tersebut belum sepenuhnya menunjukkan analisis strategis mengenai target, risiko, kebutuhan modal, dan proyeksi hasil usaha.

Temuan ini memperlihatkan bahwa musyawarah desa merupakan unsur penting, tetapi kualitas perencanaan juga ditentukan oleh kedalaman analisis. Perencanaan partisipatif akan lebih efektif apabila dilengkapi data pendapatan, biaya, kinerja unit usaha, kebutuhan modal, dan evaluasi risiko.

3.4 Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Gerbang Raja menggunakan program kerja dan RAB sebagai dasar penggunaan dana. Pengeluaran dilakukan melalui mekanisme persetujuan dan pengawasan pengurus. Pengawasan rutin serta kerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem bagi hasil menunjukkan adanya upaya mengendalikan penggunaan dana sekaligus mengembangkan usaha secara adaptif.

Usaha Jaya juga memiliki mekanisme pengajuan kebutuhan dana dari unit usaha kepada bendahara dan persetujuan direktur sebelum pencairan. Pengawasan dilakukan melalui kontrol langsung ke lokasi unit usaha secara berkala. Dengan demikian, Usaha Jaya tidak dapat dikatakan tidak memiliki pengendalian sama sekali. Namun, sistem tersebut masih lebih sederhana dan belum sepenuhnya didukung dokumentasi serta prosedur tertulis yang konsisten.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran membutuhkan lebih dari sekadar persetujuan. Pengendalian internal harus mencakup pemisahan fungsi, bukti transaksi, batas kewenangan, pemeriksaan berkala, dan pencocokan antara rencana dengan realisasi.

3.5 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan aspek yang paling jelas memperlihatkan perbedaan kedua BUMDes. Gerbang Raja telah melakukan pencatatan setiap transaksi dan menggunakan Excel serta aplikasi FORCA. Sistem digital memudahkan pengurus menyimpan, mengolah, dan menelusuri data keuangan. Pencatatan juga didukung nota, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya.

Usaha Jaya masih menggunakan buku kas umum secara manual. Transaksi tetap dicatat dan didukung bukti, tetapi pencatatan manual memiliki keterbatasan dalam kecepatan, konsistensi, pengolahan data, dan pencegahan kesalahan. Pencatatan manual juga membuat proses penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika jumlah transaksi meningkat atau data dari beberapa unit usaha harus digabungkan.

Temuan ini menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu, tetapi dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi. Digitalisasi harus disertai pelatihan, prosedur pencadangan data, pembagian akses, dan pemeriksaan berkala agar tidak sekadar memindahkan pencatatan manual ke media elektronik.

3.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Gerbang Raja menyusun laporan secara berkala dan melakukan pelaporan rutin setiap tiga bulan. Laporan disampaikan kepada pemerintah desa, pengawas, dan masyarakat. Pelaporan yang lebih sering memungkinkan masalah keuangan diketahui lebih cepat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Usaha Jaya menyusun laporan bulanan, tetapi pelaporan formal dilakukan setiap enam bulan atau satu tahun sekali. Laporan telah memuat informasi pemasukan dan pengeluaran serta berupaya menyesuaikan diri dengan SAK EMKM, tetapi penerapannya belum optimal karena proses pencatatan masih manual. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keberadaan laporan dan kualitas informasi yang disajikan.

Dalam pertanggungjawaban, kedua BUMDes menyampaikan informasi melalui musyawarah desa. Perbedaannya terletak pada kedalaman evaluasi. Gerbang Raja melakukan evaluasi melalui rapat dan pemeriksaan laporan keuangan, sedangkan Usaha Jaya lebih banyak menggunakan laporan kegiatan usaha sebagai dasar evaluasi. Pertanggungjawaban yang efektif seharusnya tidak hanya menjelaskan kegiatan, tetapi juga menunjukkan posisi keuangan, hasil usaha, penggunaan modal, kendala, dan rencana tindak lanjut.

3.7 Faktor Penyebab Perbedaan

Pertama, kapasitas sumber daya manusia. Pengurus yang memiliki pemahaman administrasi dan akuntansi lebih baik cenderung mampu menyusun pencatatan dan laporan secara tertib. Keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan pengurus hanya berfokus pada pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa mengembangkan laporan yang lebih informatif.

Kedua, penggunaan sistem dan teknologi. Gerbang Raja telah memanfaatkan Excel dan FORCA, sedangkan Usaha Jaya masih mengandalkan buku kas umum. Sistem digital membantu meningkatkan efisiensi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan pengguna dan kualitas prosedur.

Ketiga, dukungan dan pengawasan pemerintah desa. Pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta pemeriksaan berkala dapat membantu BUMDes memperbaiki administrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar. Dukungan kelembagaan juga penting agar pengurus tidak bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan akuntansi.

Keempat, kesadaran terhadap transparansi dan akuntabilitas. Transparansi bukan hanya menyampaikan laporan, melainkan menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami. Akuntabilitas juga membutuhkan dokumentasi dan evaluasi yang memungkinkan setiap penggunaan dana ditelusuri.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa regulasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Regulasi harus diterjemahkan ke dalam prosedur kerja, kompetensi pengurus, teknologi, pengawasan, dan budaya organisasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya sama-sama mencakup lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kedua BUMDes telah menjalankan tahapan tersebut, tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat sistematisasi dan penerapannya.

BUMDes Gerbang Raja menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Perencanaan dilakukan melalui evaluasi kegiatan sebelumnya dan musyawarah yang melibatkan pemerintah desa serta masyarakat. Pelaksanaan dana dilakukan melalui mekanisme pengajuan dan persetujuan. Penatausahaan telah menggunakan Excel dan aplikasi pendukung. Laporan keuangan disusun secara rutin dan disampaikan kepada pihak terkait. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan dan musyawarah desa.

BUMDes Usaha Jaya juga telah menjalankan proses perencanaan dan pelaksanaan serta menyediakan laporan keuangan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penatausahaan karena pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Frekuensi pelaporan juga lebih rendah dibandingkan Gerbang Raja. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sistem administrasi dan kapasitas pengurus.

Perbedaan pengelolaan keuangan kedua BUMDes terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dan sistem pencatatan, dukungan serta pengawasan pemerintah desa, dan kesadaran terhadap transparansi dan akuntabilitas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang seragam. Kemampuan organisasi dalam menerapkan regulasi, membangun sistem administrasi, dan meningkatkan kompetensi pengurus juga menjadi faktor penting.

Bagi BUMDes Usaha Jaya, peningkatan dapat diarahkan pada penguatan kapasitas pengurus, penyusunan prosedur operasional yang lebih jelas, perbaikan sistem pencatatan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi keuangan. Bagi BUMDes Gerbang Raja, sistem yang telah berjalan perlu dipertahankan dan dikembangkan melalui peningkatan kualitas pelaporan dan pengembangan unit usaha. Pemerintah desa juga perlu memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, dan pendampingan agar pengelolaan keuangan kedua BUMDes semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

4.2 Saran/Rekomendasi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes: BUMDes Gerbang Raja dan BUMDes Usaha Jaya perlu meningkatkan kompetensi pengurus, khususnya dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan. Pelatihan mengenai pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan secara berkala agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Meningkatkan sistem administrasi dan pencatatan keuangan: BUMDes Usaha Jaya khususnya perlu memperbaiki sistem pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dengan menerapkan sistem administrasi yang lebih terstruktur. Pencatatan setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran sebaiknya dilakukan secara rutin dan disertai dengan bukti transaksi agar memudahkan proses pemeriksaan serta penyusunan laporan keuangan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan: Pengurus BUMDes perlu menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, tetapi juga sebagai dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan perkembangan usaha BUMDes sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- 4) Memperkuat pengawasan dan keterlibatan pemerintah desa: Pemerintah Desa Huntu Barat dan Desa Huntu Selatan diharapkan meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, terutama dalam aspek perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan perencanaan dan evaluasi terhadap unit usaha BUMDes: Setiap unit usaha perlu memiliki perencanaan yang jelas mengenai modal, biaya operasional, target pendapatan, serta risiko usaha. Evaluasi terhadap kinerja masing-masing unit usaha juga perlu dilakukan secara berkala

sehingga pengurus dapat mengetahui unit usaha yang berkembang maupun yang menghadapi kendala. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan strategi pengembangan usaha dan meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa.

REFERENSI

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju ASEAN Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32.
- Anggraeni, S. N., Marlina, T., & Suwarno, S. (2021). Penyusunan laporan keuangan pada UMKM berdasarkan SAK EMKM. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2).
- Fadilah, U., Maulana, J., Halifah, I. M., & Nurhidayati, N. (2026). Sosialisasi Penerapan Tata Kelola BUMDes yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Prinsip Administrasi Publik. *KENDURI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 18-29.
- Iswoyo, A., Aminatuzzuhro, A., & Fauzuddin, Y. (2023). Laporan keuangan BUM Desa: kendala, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(2), 415-425.
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nas Media Pustaka*.
- Menne, F., & Hasiara, L. O. (2023). Analisis pengaruh kompetensi SDM dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 111-119.
- Mukromin, N., Sutikno, C., Setiawan, D., Yusuf, C., & Yuliani, T. W. (2023). Tata Kelola Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan Kabupaten Banyumas. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 3(2), 580-588.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Pujiriyani, D. W., Estede, S., Muta'ali, L., Juansa, A., ... & Minarsi, A. (2025). *EKONOMI DESA: Strategi Pemberdayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341-347.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.
- Siregar, S., Setiawan, B., & Novita, D. (2023). Analisis Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Agricra*, 16(2), 177-189.
- Sitepu, R. (2018). Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan ekonomi di desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 8-15.
- Syafikri, A. F., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa dengan perspektif good governance di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 208.